

**KINERJA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DALAM  
PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA PEKANBARU)**

**Oleh: Helmida Erdiantikah**

**Pembimbing: Sujianto**

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The case of exploitation of children both economically and sexually is one of the problems in the country that has never been resolved. There are no exception cities in Riau especially in Pekanbaru City which often get the spotlight from the Regional Government. The Social Rehabilitation Section in Child Protection as the party responsible for realizing social welfare in the area of Pekanbaru City has done various ways to be able to provide protection to minors, but children who are economically and sexually exploited are still mushrooming in this Sorcerer City . The purpose of this study was to determine the Performance of the Social Rehabilitation Section in Child Protection and analyze the inhibiting factors of the Social Rehabilitation Section in Child Protection. The theoretical concept used is the theory of Organizational Performance by Agus Dwiyanto in Aprilia (2018: 40), namely: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. This study uses a qualitative method of case study approach, the selection of informants using Purposive Sampling techniques with data collection techniques include: observation, interviews and documentation. The results of this study can be seen that the Performance of the Social Rehabilitation Section in the Protection of Children in the City of Pekanbaru has been optimal, as seen from the cases resolved each year always increasing. However, there are some obstacles experienced by the Social Rehabilitation Section in Child Protection, namely Budget, Communication, and inadequate facilities and infrastructure.*

***Keyword: Performance, Organizational and Organizational Performance***

## 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan yang terjadi di Kota Pekanbaru muncul pula persoalan seperti kesenjangan atau ketimpangan hak yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran, pekerja anak dibawah umur dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU ini dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Maraknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi pada anak-anak di Kota

Pekanbaru membuat pemerintah mengambil andil dalam hal ini yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak yang memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. **Gultom (2008: 33)** mengemukakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan agar setiap anak mampu mengembangkan potensinya dan tumbuh secara wajar.

Setiap organisasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari tujuan, visi, dan misi organisasi yang diembannya. Apalagi sebuah instansi pemerintah, sebagai organisasi publik selain berpedoman pada tujuan, visi, dan misi organisasi juga harus lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena, pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur pemerintah sebagai abdi negara yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Seksi rehabilitasi sosial dalam perlindungan anak yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayan publik bagi anak-anak korban PMKS harus memiliki kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja Organisasi merupakan pencapaian hasil kerja sebuah organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan atau kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan dalam kurun

waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan publik.

Penilaian kinerja sangat penting sebagai upaya untuk menilai kinerja seorang pegawai atau instansi Pemerintah karena dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan atau berbagai faktor sukses bagi kinerja pegawai atau instansi, maka diharapkan pegawai atau instansi tersebut dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Sehingga dengan adanya penilaian kinerja dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik oleh instansi pelayanan publik seperti instansi Pemerintahan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, keberadaan Seksi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Pekanbaru).**

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus

Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru)?

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru).
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi organisasi sektor publik yang berwenang, seperti Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru khususnya Seksi Rehabilitasi dalam Perlindungan Anak.
- b. Manfaat Akademis  
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi. Serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
- c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang Ilmu Administrasi, terutama untuk pengembangan teori-teori tentang Kinerja Organisasi Sektor Publik.

Kinerja merupakan cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran, dan penilaian (Casco, 2013). Robbins dalam Sinambela (2017:480) mengemukakan bahwa kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja seseorang sangatlah penting, sebab dengan kinerja akan diketahui seberapa jauh kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Hasibuan (2010:105) memberikan pengertian kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam mengemukakan ada tiga level kinerja, yaitu:

- a. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
- b. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
- c. Kinerja individu/pekerjaan; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini

## 1.5 Konsep Teori

### 1.5.1 Kinerja

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang dilaksanakan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Siagian (2009:168) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi kepada pegawai sesuai dengan *job description* nya.

Delly Taidy (2013:23) terkait dengan konsep kinerja Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:31)

dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

### 1.5.2 Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2016:107) kinerja organisasi merupakan sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan

kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhan secara efektif.

**Pasolong (2010:375)**, tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu.

**Gomes dalam Nuraini (2013)** Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Model penilaian kinerja meliputi indikator sebagai berikut:

1. Kualitas kerja adalah akurasi, ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan
2. Produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu.
3. Pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi praktis/teknis yang digunakan pada pekerjaan
4. Bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas
5. Kehadiran adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan
6. Kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa pengawasan.

**Nasucha dalam Pasolong (2010:180)** adapun lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik adalah :

1. Pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan
2. Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan.
3. Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran.
4. Efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai.
5. *Equity*, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan.

**Dwiyanto dalam Aprilia (2018:40)** menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja berguna sebagai alat untuk mengukur dan melihat berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas, program secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, peneliti menggunakan indikator kinerja organisasi oleh **Dwiyanto** dalam **Aprilia (2018:40)** karena dipandang lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru dalam mengatasi kasus eksploitasi anak di Kota Pekanbaru dibandingkan dengan indikator kinerja lainnya. Lima indikator kinerja oleh Dwiyanto terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Produktivitas dari suatu organisasi dapat dilihat dari rasio input dan output, kualitas layanan dapat dilihat dari sumber daya manusia dan kepuasan masyarakat, responsivitas dapat dilihat dari prosedur dan keinginan masyarakat, responsibilitas dapat dilihat dari tanggung jawab dan administrasi pelayanan sedangkan akuntabilitas dapat dilihat dari target yang di capai.

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi sasaran yang sangat membantu untuk menemukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk memberikan informasi yang valid. Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Jalan datuk Setia Maharaja No. 6 Kec. Bukit Raya. Fokus penelitian ini pada Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru). Adapun alasan untuk lokasi penelitian ini karena Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau dimana sebagai pusat kawasan Industri dan juga sebagai daerah yang memiliki lembaga pendidikan tinggi sehingga terjadinya urbanisasi akan mengakibatkan Kota Pekanbaru padat penduduk yang menimbulkan banyak dampak negatif seperti timbulnya kasus eksploitasi pada anak-anak dibawah umur.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, dipilih informan- informan yang mengetahui tentang kinerja Seksi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak. Oleh karena itu penelitian menetapkan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang terdiri dari informan kunci (*key information*). Informan kunci (*key information*) adalah orang yang mengetahui secara mendalam, yang menjadi informan kunci dalam permasalahan ini adalah:

1. Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak
4. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

5. Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Bapak Ronald dan Ibu Putri)
6. Anak Korban Eksploitasi Seksual (SH, 14 Tahun)

### 1.6.3 Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu diperoleh dalam penelitian ini yang dilakukan melalui observasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu data yang langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak). Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap anak-anak korban eksploitasi. Data tersebut dipahami, diteliti dan diolah juga oleh peneliti sehingga menjadi data yang dapat lebih mudah di pahami oleh pembaca.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh oleh peneliti dalam bentuk dokumen seperti Rekapitulasi data anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual di Kota Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta dokumen lainnya, hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal). Dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, data tersebut dipahami, diteliti dan dianalisis secara mendalam lagi oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan), teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini dilakukan dengan wawancara yang dimulai pada periode bulan November 2018 sampai dengan Maret tahun 2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai narasumber dalam penelitian ini. Peneliti telah melakukan observasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, observasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana kinerja seksi rehabilitasi sosial dalam perlindungan anak. Dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis ataupun bentuk *soft copy* yang di dapatkan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dikemas secara baik dan sederhana agar para pembaca mudah untuk memahaminya.

- b. Interview (Wawancara), setelah melakukan observasi peneliti melakukan wawancara terhadap *key-informan* (informan kunci) untuk memperoleh data mengenai kinerja seksi rehabilitasi sosial dalam perlindungan anak. Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah di tetapkan sekaligus melakukan survei ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata dilapangan. Hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan di pahami secara mendalam, setelah itu di rekap menjadi tabel hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan.

- c. Dokumentasi, data yang diambil selama melakukan proses observasi, wawancara dan survei bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya.

### 1.6.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti, dimana proses ini menentukan aspek validasi informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian (Agustinova, 2015). Dalam penelitian ini, penulis merujuk pendapat (Creswell, 2016) mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang di peroleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari ke dalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data

tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali di dasarnya pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan di sajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

### 1.6.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan, maka kesimpulan akhir dari penelitian mengenai Seksi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru) dapat dikatakan sudah optimal. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru)

Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan kepada anak-

anak korban PMKS dan masyarakat di Kota Pekanbaru dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemampuan menghasilkan kinerja organisasi yang baik tidak terlepas dari kemampuan organisasi untuk tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, mampu untuk bisa menjelaskan dalam setiap pelaksanaan kerja yang dibebankan kepada masing-masing unit kerja, dan organisasi juga mampu memiliki konsistensi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.

2. Faktor-faktor yang menghambat Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru)

Ada beberapa faktor yang menghambat kinerja bidang rehabilitasi sosial dalam perlindungan anak yaitu baik dari segi anggaran yang mana anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan anak-anak korban PMKS serta memberi pelatihan, pembinaan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Selain dari anggaran ada juga komunikasi yang menjadi hambatan bagi seksi anak untuk menjalankan tugasnya, pasalnya komunikasi yang dilakukan belum efektif karena sering terjadinya *miscommunication* antara berbagai pihak sehingga dirasa belum mampu menciptakan komunikasi yang baik di setiap organisasi publik. Kemudian seksi anak juga mengalami hambatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru, karena kasus PMKS telah banyak menjamur di Kota Bertuah ini sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru dirasa sudah tidak efektif lagi digunakan untuk membina korban PMKS.

### 1.6.6 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan mengenai Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Pekanbaru) berikut peneliti uraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk pemerintah, instansi terkait, masyarakat maupun pembaca lainnya :

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja, Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak perlu menempatkan pegawai yang kompeten, ahli di bidangnya, dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan yang diberikan. Serta perlunya interaksi langsung melalui sosialisasi dengan masyarakat guna mempermudah jalinan komunikasi agar mempermudah seksi anak untuk menangani anak-anak korban PMKS.
2. Untuk lebih meningkatkan faktor kepemimpinan yang lebih baik lagi, maka pimpinan hendaknya selalu dapat memberikan masukan yang positif pada para pegawai yang ada di seksi rehabilitasi sosial dalam perlindungan anak agar nantinya para pegawai resos anak merasa semangat bekerja dan dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka, seperti memberikan solusi pada para pegawai yang membutuhkan bantuan, memberikan apresiasi penghargaan diri kepada pegawai teladan sebagai contoh pegawai yang lain, memberikan kritik dan saran yang membangun agar para pegawai mendapatkan motivasi yang lebih dalam bekerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S Ruky. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja. Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Brantas, 2009. *Mengenal Manajemen Organisasi*. Jakarta: Yudistira
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, S. P Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nuraini. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Yayasan Ainisyam.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

*Budaya Provinsi Riau*. JOM FISIP Volume 4 No. 2.

## Jurnal

Suherman, Lilik. 2015. *Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Di Kota Pekanbaru*. Volume. I. No. 1.

Saputra, Mardiansyah. 2016. *Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Volume. III. No. 2.

Syukri, Mhd. 2016. *Penyidik Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Volume III. No. 1.

Hidayatullah, Rian. 2014. *Analisis Kinerja Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pembinaan Anak Jalanan)*. Jom FISIP Volume 1 No.2.

Arliman S, Laurensius. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*. Arena Hukum Volume 9. No. 1.

Dhiza, Arrauda. 2017. *Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah Dan Taman*

Aprilia S, Nadya. 2018. *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*. Repositoty-untirta.ac.id

## Media

[www.halloriau.com](http://www.halloriau.com), Dinsos butuh Balai PMKS untuk atasi penyakit masyarakat di Pekanbaru (diakses pada hari rabu, tanggal 28 Februari 2018 Pukul 12:23 WIB)

<http://www.bertuahpos.com>, Marak prostitusi anak, Kadisdik Pekanbaru minta orang tua jemput siswa (diakses pada hari kamis, tanggal 16 Maret 2017 Pukul 16:47 WIB)

<http://situsriau.com>, Miris, prostitusi online di Pekanbaru melibatkan anak usia sekolah (diakses pada hari rabu, tanggal 09 Januari 2019 Pukul 14:38 WIB)

## Dokumen

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Rekapitulasi Respon Kasus Tahun 2016-  
2018 Pada Seksi Rehabilitasi Sosial  
Dan Perlindungan Anak Bidang  
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota  
Pekanbaru

Dokumen Rehabilitasi Sosial Anak Yang  
Memerlukan Perlindungan Khusus